

Performance Report

Tahun 2016



Performance Report

Tahun 2016



Kata Pengantar

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga penyusunan *Performance Report* Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 ini dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2016 dan komitmen nyata untuk terus melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan. *Performance Report* ini memuat hasil analisis terhadap capaian sasaran pembangunan dengan mengedepankan aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Pemda DIY. Penyusunan buku ini bertujuan memberikan informasi capaian kinerja secara terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemda DIY.

Pengukuran kinerja Pemda DIY Tahun 2016 berpijak pada dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY Tahun 2012-2017. Dinamika pembangunan daerah selama kurun waktu 2016 menunjukkan banyak sekali pencapaian sasaran, seperti: peningkatan angka harapan hidup, angka melek huruf, jumlah kunjungan wisatawan, nilai akuntabilitas kinerja, opini BPK, *load factor* angkutan perkotaan, peningkatan kualitas lingkungan, dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Meskipun demikian, harus diakui masih terdapat sejumlah kinerja yang capaiannya belum optimal, seperti: ketimpangan pendapatan, ketimpangan wilayah, dan lama tinggal wisatawan. Berkaitan dengan hal tersebut, analisis dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif menjadikan *Performance Report* Tahun 2016 ini sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja pembangunan agar lebih relevan, efektif, efisien, berdampak, dan berkelanjutan.

Sumbang saran senantiasa terus diperlukan agar kualitas pembangunan ke depan menjadi semakin baik. Semoga dokumen ini memberikan kemanfaatan bagi siapapun dan masa depan yang lebih baik.

Terima Kasih

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Daftar Isi



Kata Pengantar

3

Sepenggal Perjalanan Masa Lalu

6

Tentang Jogja

11

Kebudayaan Sebagai Pilar Membangun Peradaban

15



Jogja Gumregah
Sebagai Spirit Aktualisasi
Refomasi Birokrasi

18

Potret
Kinerja Daerah

22

Sentuhan
Inovasi Daerah

37

Penutup

49

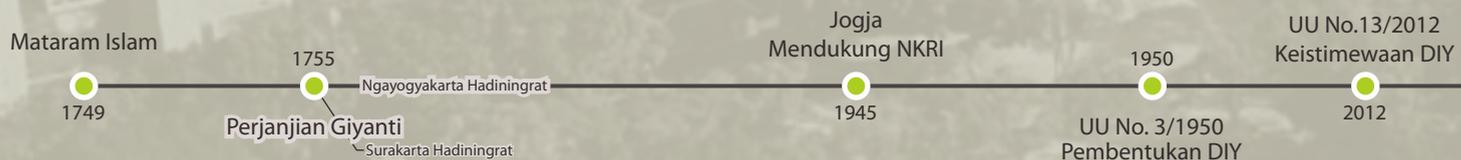
Sepenggal Perjalanan Masa Lalu

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki sejarah yang panjang, sejak adanya pergolakan pada era Kerajaan Mataram Islam, dengan sosok Pangeran Mangkubumi. Beliau memimpin pemberontakan menentang kesewenang-wenangan VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) Belanda sejak 1746, sehingga kemudian dinobatkan sebagai Raja Mataram oleh rakyat pada tahun 1749 di Desa Kabanaran. Perjuangan beliau melawan VOC terus dilakukan hingga menyebabkan situasi VOC semakin melemah, hingga kemudian menghasilkan kesepakatan untuk membagi Kerajaan Mataram Islam menjadi dua, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755, di Desa Giyanti.

Perjanjian Giyanti –yang dikenal sebagai *Palihan Nagari*– mengukuhkan Pangeran Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwana Senopati ing Ngalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullah dan berkuasa atas separuh dari Kerajaan Mataram. Selain itu, ditetapkan juga posisi Papatih Dalem sebagai pelaksana pemerintahan harian, pengampunan terhadap para bupati sebagai penguasa daerah bawahan, dan pembayaran ganti rugi. Sejak saat itu, dimulailah dasar-dasar pemerintahan monarki atas Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

Campur tangan pemerintah kolonial yang terlalu masif menyebabkan gejolak di internal pemerintahan Kasultanan Ngayogyakarta, hingga puncaknya pecah Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Dengan berakhirnya perang tersebut, dimulailah era tanam paksa dan dilanjutkan pembangunan industri perkebunan strategis melalui penanaman modal asing secara besar-besaran. Meski demikian, kedaulatan Kasultanan Ngayogyakarta tetap dihormati sebagai daerah otonom, dibuktikan dengan adanya kontrak politik di tiap bertahtanya raja baru, sebagaimana pada era Sultan Hamengku Buwono V hingga Sultan Hamengku Buwono IX.

Hal ini menunjukkan bahwa Keraton tidak tunduk begitu saja kepada Belanda. Pemerintah Kolonial mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sebagai kerajaan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri –dikenal dengan *zifbesturende landschappen*–. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 47, sedangkan kontrak politik Kadipaten Pakualaman dalam *Staatsblaad* 1941 Nomor 577.





Ketika terjadi pergantian kekuasaan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Pemerintahan Militer Jepang pada tahun 1942-1945, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta diakui sebagai Daerah Istimewa atau *Kooti* dengan *Koo* sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Di bawah *Kooti*, secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya. Beberapa saat sebelum kekalahan Jepang pada tahun 1945, Sultan Hamengku Buwono IX merangkap jabatan sebagai patih sehingga juga mengatur jalannya roda pemerintahan sehari-hari.

Sultan Hamengku Buwono IX meneguhkan sikapnya pasca menyerahnya Jepang kepada Sekutu pada Agustus 1945, untuk bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bersama Sri Paduka Paku Alam VIII, Raja Kasultanan Ngayogyakarta menyatakan kepada Presiden Republik Indonesia (RI) bahwa Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam:

1. Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden RI
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945

Dukungan lain Kasultanan Ngayogyakarta atas berdirinya NKRI ditunjukkan ketika Pemerintah Belanda berniat kembali berkuasa di wilayah RI, pada era perang kemerdekaan 1946-1949. Sri Sultan Hamengku Buwono IX mempersilahkan Yogyakarta dijadikan sebagai ibukota negara setelah kondisi Jakarta tidak kondusif.

Peristiwa penting lain yaitu penyerahan kedaulatan secara simbolis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Belanda pada tahun 1949 yang dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX selaku wakil Pemerintah RI dengan Wakil Tinggi Mahkota Kerajaan Belanda (H.J. Lovink) di Jakarta. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya era penjajahan Belanda selama 350 tahun.

Pasca penyerahan kedaulatan, wilayah Kasultanan Ngayogyakarta diberikan status daerah istimewa, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Bahkan, pada setiap Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Menilik atas proses perkembangan tata pemerintahan, Pemda DIY melakukan transformasi dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern, menjunjung tinggi hukum dan demokratis.



Ketika reformasi 1998, sosok Sri Sultan Hamengku Buwono X juga menjadi tokoh reformis nasional yang menyuarakan perubahan, termasuk langsung melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal itu, Pemda DIY memiliki banyak *affirmative action* untuk melakukan terobosan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti: penataan kepegawaian (*rightsizing*), penyusunan standar pelayanan minimal, pengembangan *e-government*, penyusunan *performanced based budgeting*, dan penerapan *standard operating procedure*.

Sejumlah perubahan tata kelola pemerintahan yang terjadi di Pemda DIY justru menarik, ketika sosok Gubernur juga dijabat oleh Raja Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, yang memiliki jiwa demokratis dan konsisten untuk melaksanakan reformasi di segala bidang. Sejumlah prestasi kinerja pembangunan diperoleh DIY sebagai hasil dari upaya reformasi tersebut, seperti: indeks kebahagiaan tertinggi nasional, indeks pembangunan manusia yang termasuk kategori terbaik nasional, capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mendapat predikat terbaik nasional, indeks integritas korupsi memiliki capaian terbaik nasional, dan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK, serta capaian IDI DIY yang juga masuk dalam kategori terbaik nasional.

Sejumlah kinerja pembangunan yang justru meningkat dalam perspektif positif tersebut, semakin mengukuhkan bahwa status keistimewaan yang kemudian dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, justru menjadi pijakan untuk menegaskan komitmen untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Semangat “Tahta untuk Rakyat” yang diinspirasi dari filosofi “Manunggaling Kawulo Gusti”, menunjukkan bahwa pengaturan Keistimewaan DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin *ke-bhinneka-tunggal-ika-an*, dan melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Jogjakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan pada pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, *ke-bhinneka-tunggal-ika-an* efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi Keistimewaan DIY diletakkan pada tingkatan pemerintah provinsi.

Kewenangan dalam urusan Kestimewaan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 7 ayat 2 meliputi:

tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemda DIY; kebudayaan; pertanahan; dan tata ruang. Dengan demikian, Pemda DIY mempunyai kewenangan yang meliputi kewenangan urusan Keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Posisi DIY merupakan daerah istimewa yang kedudukannya setara dengan wilayah provinsi dan memiliki wewenang istimewa untuk lima urusan, sebagaimana secara jelas dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pasca disahkannya status keistimewaan DIY, Pemda DIY terus melakukan penataan baik dalam perspektif reformasi birokrasi maupun pembangunan daerah. Beberapa permasalahan masih dihadapi diantaranya: kemiskinan dan ketimpangan pembangunan yang menjadi pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Sejumlah pembangunan infrastruktur untuk

menekan ketimpangan dan memacu pertumbuhan berkualitas juga terus dilakukan, seperti: pembangunan bandara baru, pembangunan jalur jalan lintas selatan, pembangunan pelabuhan perikanan, dan sejumlah sarana prasarana pariwisata unggulan di kawasan selatan.

DIY sudah dan terus memulai langkah-langkah perubahan untuk menuju tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Sejumlah terobosan dilakukan dengan memanfaatkan informasi teknologi melalui pengembangan *e-performanced based budgeting* yang mengintegrasikan manajemen pembangunan secara terpadu. Upaya itu dilakukan dengan dukungan kepemimpinan yang berorientasi pada pengelolaan modern yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima, tanpa harus kehilangan identitas budaya sebagai pondasi untuk melaksanakan program-program perubahan. DIY membuktikan bahwa komitmen reformasi tidak sekedar memerlukan keteladanan dan peningkatan kualitas akuntabilitas semata, melainkan juga kesabaran.



Tentang Jogja

Geografis

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terletak di bagian tengah Pulau Jawa, dengan sisi Selatan dibatasi Samudera Indonesia, sedangkan di bagian lainnya berbatasan dengan enam kabupaten Provinsi Jawa Tengah. DIY terdiri atas satu kota dan empat kabupaten dengan 78 kecamatan dan 438 desa/kelurahan. Luas wilayah DIY adalah 3.185,80 km² –atau 0,17% dari luas Indonesia–. Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten terluas (46,63%), diikuti oleh Kulon Progo (18,40%), Sleman (18,04%), Bantul (15,91%), dan Kota Yogyakarta (1,02%).

Demografis

Pada tahun 2016, jumlah penduduk DIY sebanyak 3.720.912 orang dengan komposisi penduduk laki-laki sebesar 49,45% dan perempuan sebesar 50,55%.

Ketenagakerjaan

Penduduk DIY didominasi penduduk usia muda atau kelompok usia produktif (20-29 tahun) sebesar 16,63%. Jumlah angkatan kerja DIY pada tahun 2016 sebanyak 2.099.436 orang (71,96% dari total penduduk DIY berumur 15 tahun ke atas). Pada Agustus 2016, Pengangguran Terbuka DIY sebesar 2,72% lebih



- Persebaran penduduk DIY tahun 2015 terbanyak berada di Kabupaten Sleman (31,73%), dan paling sedikit di Kabupaten Kulon Progo (11,20%)



- Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan, Tahun 2016



Sumber: BPS Sakernas Agustus 2014-2016

rendah dari persentase Nasional (5,49%). TPT didominasi oleh angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SMTA Kejuruan sebesar 5,76%.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nilai IPM DIY pada tahun 2015 sebesar 77,59, lebih tinggi dari rata-rata IPM Nasional sebesar 69,55. IPM tingkat kabupaten/kota di wilayah DIY menunjukkan Kota Yogyakarta menduduki peringkat pertama dengan angka IPM sebesar 84,56 diikuti oleh Kabupaten Sleman sebesar 81,2, Kabupaten Bantul sebesar 77,99, Kabupaten Kulon Progo sebesar 71,52 dan Kabupaten Gunungkidul sebesar 67,41.

Indeks Pembangunan Gender (IPG)

DIY termasuk salah satu provinsi yang nilai IPG nya tertinggi di tingkat nasional. DIY menempati ranking ke-3 dengan capaian IPG sebesar 94,31, setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara. Capaian IPG DIY dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2015 capaian IPG DIY sebesar 94,31 sedangkan IPG nasional sebesar 90,34.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Indeks Pembangunan Gender (IPG)

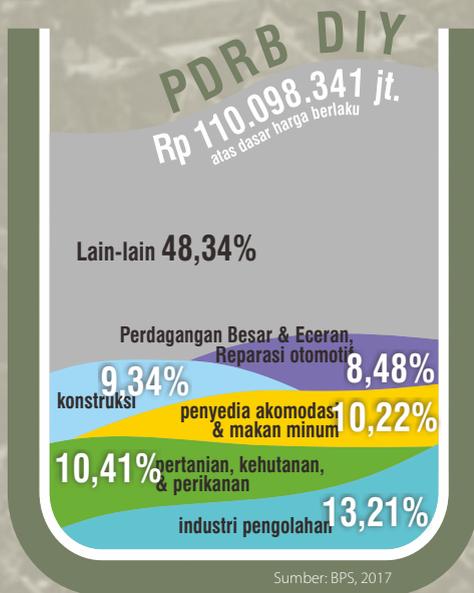


- IPG DIY menduduki peringkat ketiga setelah DKI Jakarta dan Sulawesi Utara

Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian DIY tahun 2015-2016 yang diukur dari besaran kontribusi sektor-sektor PDRB menunjukkan tidak ada lapangan usaha yang secara mencolok mendominasi perekonomian DIY.

Selama tahun 2012-2016, nilai PDRB cenderung meningkat. Laju pertumbuhan ekonomi memiliki tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,20%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013



sebesar 5,49%. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,05%. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 didorong oleh pertumbuhan positif pada sebagian besar sektor perekonomian.

Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh peningkatan nilai tambah pada semua lapangan usaha. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 14,26% diikuti oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,32%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

sebesar 6,09%, sektor jasa pendidikan sebesar 7,28% dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 7,15%.

Nilai dan laju pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berkontribusi terbesar, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) kontribusinya relatif rendah. *Share* konsumsi rumah tangga terhadap PDRB DIY tahun 2016 sebesar 67,60%, sementara PMTB sebesar 30,36%. Pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPR) dan perubahan inventori merupakan sektor penyumbang terendah dalam pembentukan PDRB DIY sisi pengeluaran.

Nilai ekspor tahun 2016 meningkat 4% dibandingkan tahun 2015 yang bernilai USD 242,57. Pertumbuhan impor DIY lebih tinggi dari pertumbuhan ekspor.



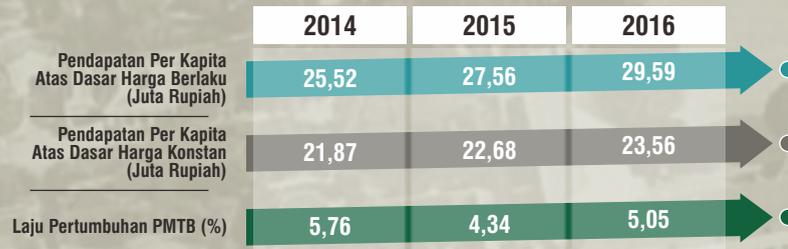
2016, **Impor** tumbuh 20,48%, sedangkan pertumbuhan **Ekspor** -0,35%.



Investasi

Nilai PMTB mencerminkan investasi fisik domestik yang direalisasikan. Pada tahun 2016 nilai PMTB DIY sebesar 33.428.978 juta rupiah. Meski kontribusi PMTB dalam pembentukan PDRB DIY lebih rendah dibandingkan sektor konsumsi rumah tangga, namun tren laju pertumbuhan PMTB selama kurun waktu 2010-2016 cenderung meningkat.

Investasi di DIY didominasi oleh PMA. Nilai investasi tahun 2016 sebesar Rp12.077.661.664.802,- dengan komposisi investasi PMA 62,55% dan investasi PMDN 37,4%. Perusahaan yang merealisasikan investasi di DIY sejumlah 314 perusahaan, yang terdiri dari 164 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 150 PMDN dengan serapan tenaga kerja sebanyak 98.546 TKI dan 609 TKA. Pada tahun 2016, tiga bidang usaha terbesar penyumbang investasi di DIY, yaitu Perusahaan PMA di bidang Jasa Rekreasi, bidang Industri Pengolahan Es Krim, dan Bidang Industri Furniture Kayu sedangkan di Perusahaan PMDN yaitu Bidang Usaha Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental, Bidang Real Estate, dan Bidang Aktivitas Taman Bertema atau Taman Hiburan.



Pendapatan Per Kapita

Pendapatan per kapita penduduk DIY selama tahun 2010-2016 terus mengalami kenaikan. Nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2016 sebesar 23,56 juta rupiah meningkat sebesar 3,88% dibanding tahun 2015. Selama enam tahun terakhir pendapatan per kapita penduduk DIY mengalami peningkatan yang cukup signifikan.



KETERLINDUNGAN WARGA

K e b u d a y a a n

Pendidikan

Pariwisata

Tata Ruang
&
Lingkungan

Kesehatan

Pangan

Ekonomi

Energi

Teknologi

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

BUDAYA KERJA SATRIYA

Kebudayaan
Sebagai Pilar
Membangun
Peradaban

Kebudayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Payung dan Arus Utama (*mainstreaming*) pembangunan di segala bidang. Hal ini menjadi spirit yang memandang kebudayaan sebagai buah budi manusia yang beradab, juga sebagai buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang saling berhadapan: interaksi alam dan zaman; kodrat dan masyarakat; kekuatan alam-kodrat dan

tuntutan perkembangan masyarakat-bangsa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis. Itulah sebabnya, kebudayaan penuh cerita tentang perubahan-perubahan, yang memberi inspirasi baru terhadap pola-pola kebudayaan yang sudah ada, termasuk warna pada setiap sektor kehidupan dalam perspektif pembangunan daerah.

Meningkatkan Akuntabilitas Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Secara Berkeadilan

Perencanaan

Visi: DIY berkarakter, berbudaya, maju, mandiri & sejahtera

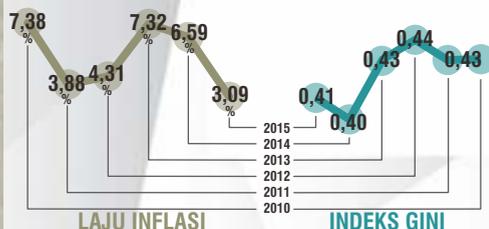
Tema: Memantapkan SDM Unggul, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesejahteraan Menuju *Renaissance* Jogja

- Pengembangan basis data melalui JogjaDataku
- Pengembangan JogjaPlan melalui inovasi spasial
- Mengakomodir usulan masyarakat melalui pengembangan aplikasi
- ASB Berbasis Program
- Pengurangan Jumlah Kegiatan

- Optimalisasi rencana operasional pelaksanaan kegiatan berbasis proses dan output
- Pemantauan capaian kinerja secara berkala
- Checking lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan
- Penilaian kinerja kegiatan instansi melalui *self assesment*
- Melakukan desk timbal balik setiap triwulan
- Kinerja organisasi diturunkan ke kinerja individu

Isu-isu Pembangunan Daerah

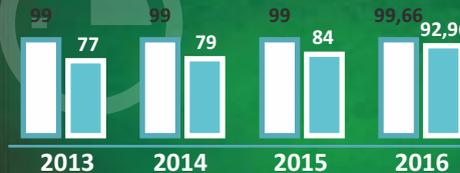
- **Tingkat Kemiskinan** yang masih di atas rata-rata nasional (13,10%);
- **Ketimpangan Pendapatan** masih tinggi (0,43)



Perjanjian Kinerja Secara Berjenjang

Pengukuran

Realisasi **Kinerja Fisik & Kinerja Keuangan**



Penyelesaian Paket Pengadaan Barang & Jasa



Pelaporan

- Penyampaian buku capaian kinerja sebagai bentuk *reward and punishment*



- Pelaporan kinerja fisik dan keuangan secara rutin
- Pelaporan capaian perjanjian kinerja secara berjenjang



Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui perencanaan strategik, kinerja yang diperjanjikan, dilaksanakan, diukur, dan dilaporkan serta dievaluasi.

Efisiensi

Kebijakan Efisiensi Perjalanan Dinas

- Pembatasan frekuensi dan jumlah peserta
- Perjalanan dinas hanya dilakukan yang tidak terhindarkan
- Fungsi money move dilakukan dengan mengoptimalkan sarana TI

Kebijakan Efisiensi Penyelenggaraan Rapat

- Rasionalisasi peserta rapat
- Pembatasan pemberian jumlah dan jenis hidangan

Penundaan Pengadaan Kendaraan Operasional

- Optimalisasi penggunaan kendaraan dinas dan operasional

Kebijakan Pengurangan Program dan Kegiatan

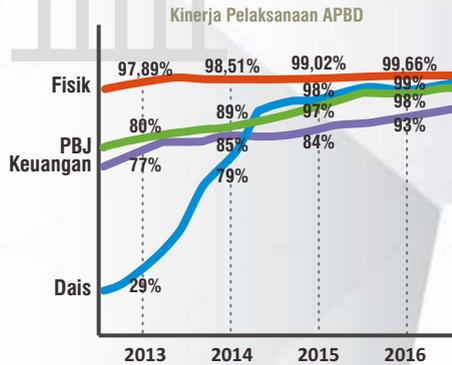
- Dituangkan dalam ASB Basis Program
- 1 Program 1 Tim
- Money Follow Program, Program Follow Follow Result

Kebijakan Go Green

- Penghematan biaya dari penggunaan keperluan sehari-hari (air, listrik, telepon, ATK)



Capaian



- Layanan e-SAMSAT
- Layanan perpustakaan digital: iJOGJA
- Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu
- *Decision Support System (DSS)* Rekomendasi Pemanfaatan Ruang



- Pada Agustus 2016, tingkat pengangguran DIY menurun dan peringkatnya di bawah nasional;
- Tingkat pengangguran DIY pada Agustus 2016 mencapai 2,72%, sementara nasional mencapai 5,49%;
- Hal tersebut dipengaruhi tingginya pekerja setengah pengangguran atau pengangguran terselubung, terutama di perdesaan

Evaluasi

- Penguatan rumusan indikator program
- Capaian program menjadi bagian kinerja SKPD
- Menyusun pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja
- Melakukan evaluasi terhadap tahapan pembangunan (*ex-ante*, *on going*, dan *ex-ante*)
- Tindak lanjut evaluasi untuk mengukur keberhasilan dan perbaikan perencanaan
- Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan

Indeks Demokrasi Indonesia: Cenderung Meningkat

PERKEMBANGAN INDEKS VARIABEL IDI DIY 2014-2016:



Jogja Gumregah
Sebagai Spirit
Aktualisasi
Reformasi
Birokrasi



Jogja Gumregah merupakan tekad untuk mewujudkan peradaban baru, unggul, bersumber dari: integritas, watak manusia, *jalma manungsa* yang utama bermodal dasar kebudayaan dan pendidikan. Semangat *Gumregah* menjadi inspirasi untuk bangkit, bergerak dan bekerja nyata segenap komponen masyarakat DIY dalam mengembalikan jati diri dan keutamaan berbangsa sebagai penuntun gerak sendi kehidupan masyarakat, menuju DIY yang sejahtera (bermartabat, mandiri, damai, adil dan makmur).

Peradaban baru (*renaissance*) DIY merupakan konsep pembangunan yang diawali dengan menggali, mengkaji dan mengembangkan sumber ilmu pengetahuan canggih di masa lalu, seperti sains kontruksi candi Borobudur, karya sastra dan lainnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat nilai-nilai filosofis yang mengajarkan kebajikan untuk mencerahkan nalar. Sehingga, terciptalah kondisi kondusif seni dan sains, seperti sejarah Eropa di masa lampau.

Renaissance Jogja dipayungi filosofi *Hamemayu Hayuning Bawana*, dihidupi oleh semangat gotong royong yang mengacu pada konsep *aworing kawula-gusti* dan *golong-gilig*, serta diekspresikan oleh sikap Satriya: *sawiji, greget, sengguh, ora-mingkuh*, memberikan vitalitas dan roh baru, arah baru, nilai baru, serta kekuatan baru dari pergeseran kekuatan peradaban yang bergerak menuju ke Timur, seraya meluruskan kembali rasa ke-Tuhan-an.

Bertolak dari pemahaman itu, strategi pencapaian *renaissance* DIY melalui:

1. Pengembalian nilai-nilai keluhuran, keutamaan dan jati diri berbangsa, menuju DIY yang sejahtera;
2. Pembebasan masyarakat dari marginalisasi martabat, kemandirian, kebersamaan dan kemakmuran dirinya;
3. Konsolidasi integrasi melalui pengakuan dan penghormatan atas keberagaman kelompok, suku, agama, ras, maupun budaya dalam kerangka *Bhinneka Tunggal Ika*;
4. Penghidupan kembali visi kemaritiman, baik dalam aspek budaya, politik, hukum, ekonomi, teknologi, kesehatan, pangan, energi, tata ruang, infrastruktur, transportasi dan komunikasi;
5. Penghidupan dan penguatan kembali nilai sejarah, budaya, dan produksi ekonomi lokal, sebagai upaya membangun kembali kepercayaan diri, identitas dan jati diri bangsa.

Dalam perspektif ini, kebudayaan menjadi arus utama (*mainstream*) pembangunan, atau menjadi warna dasar yang menjiwai pembangunan di setiap sektor. Aspek kebudayaan menjadi ciri khas di setiap wilayah di DIY, yang senantiasa dinamis dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran Jawa dan terus terbuka terhadap perubahan serta mawas diri serta waspada.

Semangat reformasi yang digulirkan, telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran serta keterpaduan pelaksanaan tugas-fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, juga dengan mempraktikkan prinsip-prinsip *good governance*.

Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public good and services*. Agar dapat menjadi kenyataan dituntut adanya: *alligment* yang baik, integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi dari segenap pelaksananya.

Mengubah citra birokrasi yang berpihak pada kepentingan publik memang tidaklah mudah. Problematika birokrasi yang masih dihadapi

pada umumnya adalah (1) Sistem politik dan manajemen pemerintahan yang belum efektif, efisien, dan transaksional; (2) Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada belum sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat (*power culture*); (3) Budaya *patron-client* dan budaya afiliasi yang mengarah pada *moral hazard*; (4) Kurangnya komitmen birokrat; dan (5) Masih belum terbentuk budaya birokrasi (*service delivery culture*).

Tantangan pelayanan publik dalam reformasi birokrasi semakin banyak seperti dalam merespon globalisasi yang menuntut daya saing di sektor publik, persoalan dasar dalam pelayanan publik, kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, serta krisis multidimensi yang perlu penanganan secara komprehensif.

Pemda DIY dalam menyikapi berbagai tuntutan itu telah melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pelayanan pemerintah. Pelibatan *multi-stakeholders* dalam menata dan merumuskan sistem birokrasi yang efisien, transparan dan akuntabel menjadi cara dan pendekatan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi. Model pembaruan birokrasi yang dikembangkan merupakan manifestasi model birokrasi pemerintahan yang katalis berbasis visi-misi. Banyak pihak mengatakan bahwa model restrukturisasi ini menjadi salah satu *best practice* di Indonesia.

Reformasi yang digulirkan Pemda DIY diharapkan menjadi momentum yang tepat dalam menyikapi tuntutan masyarakat. Program ini membutuhkan komitmen dan keteladanan pada level pimpinan satuan kerja, perbaikan sistem dan struktur baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, sumber daya aparatur, pengelolaan keuangan, pengawasan, dan pelaksanaan budaya pemerintahan yang menjadi dasar budaya kerja birokrasi.

Adanya dukungan sistem *good governance* serta visi yang jelas membuat sistem pelaksanaan birokrasi diharapkan menjadi kokoh dan kuat serta ditambah dengan model *Leadership and Human Resources* sebagai penyangga. Pilar bangunan yang diperkuat penyangga, ditambah lagi dengan payung yang berisi strategi, sistem, dan *policy* yang jelas, menjadikan strategi reformasi (budaya organisasi reformatif) semakin kokoh.

Segala yang dilakukan merupakan upaya kongkret dalam mereformulasi kebijakan yang berorientasi publik. Hal yang ingin dicapai adalah mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan sistem birokrasi baru, harapan yang ingin diwujudkan adalah tersedianya staf yang berkualitas tinggi, akuntabilitas dan transparansi, berorientasi bisnis, efektif dan menguntungkan, organisasi kecil yang berkualitas, orientasi teknologi, dan manajemen berdasarkan hasil.

Dalam pelaksanaannya, perbaikan dilaksanakan secara bertahap melalui: advokasi budaya *entrepreneurship*, *branding Jogja Never Ending Asia* (*tourism marketing strategy*), kerjasama inter dan intra regional, identifikasi kelompok muda yang mempunyai integritas tinggi pada pelayanan masyarakat, dan menyusun kebijakan yang berorientasi *pro-poor*.

Reformasi birokrasi mempunyai sejumlah isu strategis, yaitu:

Pertama, reformasi memerlukan kepemimpinan yang dapat memberikan inspirasi dan teladan bagi yang lain, membangun sistem dan mengarahkan segenap langkah bersama menuju perubahan yang diinginkan.

Kedua, reformasi memerlukan kesabaran, karena memerlukan waktu dan membawa konsekuensi merubah diri. Reformasi memerlukan perubahan paradigma semua pihak yang berada dalam keseluruhan program untuk dapat menjawab berbagai tantangan.

Ketiga, reformasi birokrasi memerlukan bukti berupa pelayanan publik yang lebih baik guna memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga negara. Oleh karena itu, perubahan sistem merupakan prasyarat keberhasilan reformasi birokrasi. Mengingat dinamika tatanan masyarakat yang begitu cepat, maka diperlukan kebijakan dan aturan main birokrasi yang kondusif bagi para pelakunya.



Potret Kinerja Daerah

- Perbandingan % target capaian dan % realisasi capaian
- Rerata kinerja indikator memiliki tren meningkat dibandingkan tahun sebelumnya





Pembangunan daerah tahun 2016 merupakan tahun keempat periode RPJMD DIY 2012-2017. RKPD tahun 2016 merupakan penjabaran target kinerja yang diukur berdasar *review* RPJMD tahun 2012-2017. Upaya *review* terhadap RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dilakukan untuk menyesuaikan perubahan kelembagaan baru Pemda DIY yang diterapkan mulai tahun 2016. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan target sasaran Pemda DIY hingga sasaran dan program SKPD, dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pembangunan daerah, terutama pada tahun 2016 hingga 2017.

Sebagaimana perubahan kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki, Pemda DIY pada Tahun Anggaran 2016 telah melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja daerah, yang merupakan penjabaran dari visi-misi pembangunan daerah. Capaian indikator kinerja sasaran Pemda DIY merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Berkaitan dengan adanya *review* RPJMD sebagaimana tersebut di atas, telah dilakukan beberapa penyesuaian target indikator pada Indikator Kinerja Sasaran Pemda DIY pada tahun 2015-2017, untuk semakin memacu keberhasilan pembangunan daerah yang menuntut pengelolaan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan memiliki aspek kemanfaatan kepada masyarakat secara signifikan.

Secara umum, capaian indikator sasaran Pemda DIY pada tahun 2016, memiliki *progress* yang lebih baik dengan pertimbangan adanya pencapaian sasaran yang lebih baik dibandingkan capaian pada tahun 2015. Untuk itu, dukungan program yang memiliki signifikansi terhadap pencapaian *outcome* sasaran, sangat

diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran sebagaimana target yang sudah ditentukan. Keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung atas keberhasilan pencapaian sasaran Pemda DIY tersebut.

Selain itu, terdapat 2 indikator yang capaiannya tidak dapat diperbandingkan dengan target karena metode penghitungannya yang telah berubah. Indikator tersebut adalah: rerata lama sekolah dan pendapatan (PDRB) per kapita. Capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2016, sebagaimana rilis BPS, memiliki metode perhitungan yang berbeda dengan cara perhitungan pada target indikator yang sama. Meski demikian, capaian dua indikator rerata lama sekolah dan pendapatan per kapita pada tahun 2016 jika dibandingkan dengan capaian 2015 mengalami peningkatan.

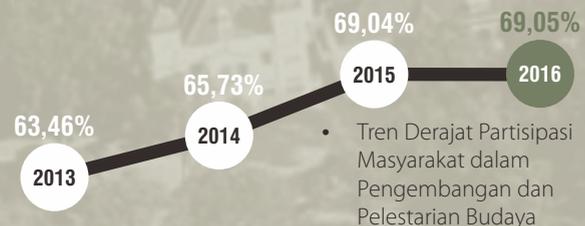
Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan

Tantangan dalam pengembangan dan pelestarian budaya ke depan akan semakin berat seiring dengan terus berlangsungnya akulturasi budaya yang mengikis ketahanan budaya masyarakat. Selama semua pemangku kepentingan berkomitmen dan konsisten menjadikan kebudayaan dan keistimewaan sebagai *mainstream* pembangunan di segala

bidang, maka visi yang menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka yang dikemas dalam *renaissance* Yogyakarta akan terwujud. Kepercayaan masyarakat kepada peran negara dalam pelestarian budaya, tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran kaidah-kaidah pelestarian budaya, akan menguatkan langkah ke depan pembangunan kebudayaan di DIY. Untuk itu Pemda DIY menerapkan kebijakan untuk berperan aktif dan menjalankan fungsi fasilitasi kepada masyarakat dalam rangka melestarikan kebudayaan.

Sasaran Peran Serta dan Apresiasi Masyarakat Dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Meningkatkan diukur dengan indikator Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya. Berkembangnya

- Target & Realisasi Derajat Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya, 2016





organisasi budaya yang dapat berupa kelompok kesenian baik tradisional maupun kontemporer, pelestari adat dan istiadat, kelompok sineas/perfilman, pemerhati/pengamat budaya, sanggar, padepokan, studio, dan lainnya juga merupakan bentuk peran serta dan apresiasi masyarakat terhadap budaya.

Partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya dipengaruhi oleh:

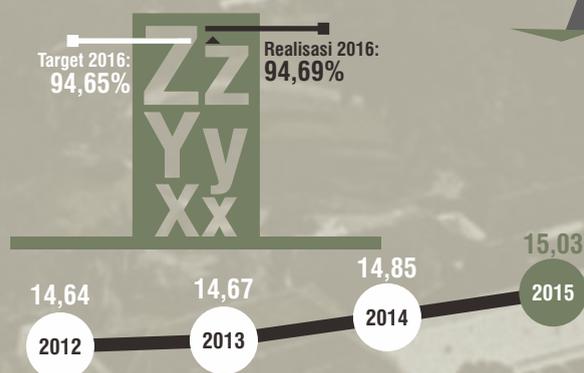
- Fasilitasi Pemda DIY;
- Penyelenggaraan events;
- Festival Budaya;
- Penyelenggaraan Festival Penggiat Seni;
- Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya.

Sasaran Melek Huruf Masyarakat Meningkat

UNDP tahun 2014 melakukan penyempurnaan penghitungan nilai pembangunan manusia. UNDP merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik. Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Pada metode baru, UNDP memperkenalkan indikator pada dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling/HLS*) yang digunakan untuk menggantikan indikator AMH.

Mengacu pada metode perhitungan tersebut, Indonesia melakukan menyesuaikan metode perhitungan IPM baru. Indikator AMH digantikan dengan HLS. Hal ini memberikan dampak pelaporan angka AMH secara nasional maupun regional tidak dilakukan kembali oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

- Target & Realisasi Angka Melek Huruf DIY, 2016



- Tren Harapan Lama Sekolah/EYS, 2012-2015 (Tahun)

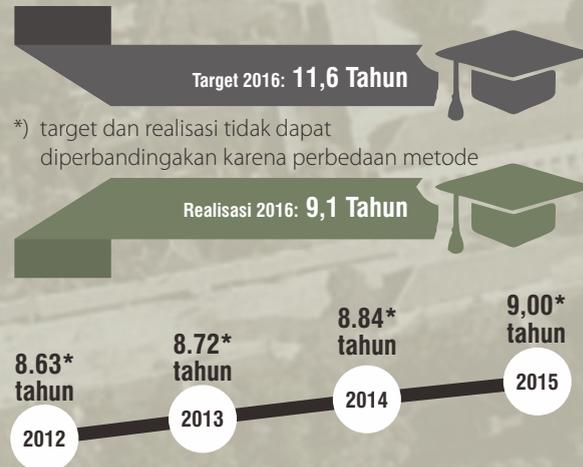
Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Kenaikan capaian AMH DIY dipengaruhi oleh pertambahan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dengan kemampuan baca dan tulis yang baik.

Sasaran Aksesibilitas Pendidikan Meningkatkan

Ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan antara lain dapat dilihat melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan. Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah "Rata-Rata Lama Sekolah".

RLS sampai tahun 2009 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 15 tahun ke atas dan mulai tahun 2013 dihitung menggunakan kelompok penduduk berusia 25 tahun ke atas. Dengan diasumsikan, pada umumnya. Penduduk usia 25 tahun ke atas merupakan stok SDM terdidik yang dimiliki oleh suatu wilayah. Penduduk berusia 25 ke atas diasumsikan tidak bersekolah lagi.



*) target dan realisasi tidak dapat dibandingkan karena perbedaan metode

• Tren Rata-rata Lama Sekolah, 2012-2015

*) Menggunakan Metode Baru

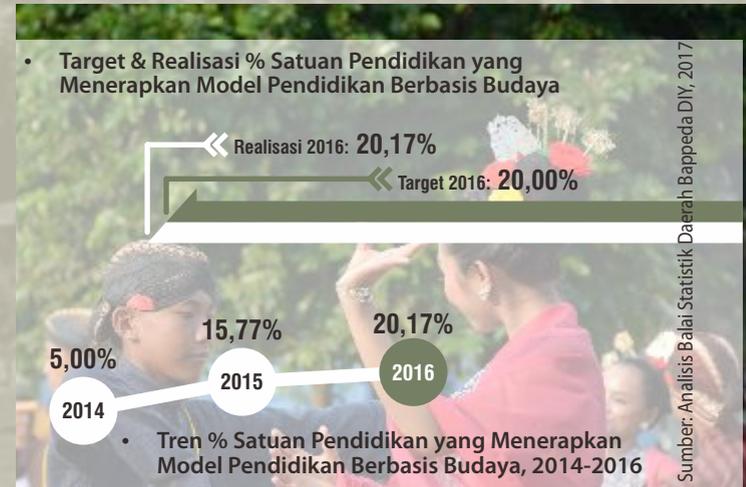
Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Jika dibandingkan dengan daerah di regional Jawa, capaian RLS DIY masih berada di atas Jawa Tengah (7,03 tahun) dan Jawa Timur (7,71 tahun).

Sasaran Daya Saing Pendidikan Meningkatkan

Pengembangan pendidikan berbasis budaya lokal dan berkarakter Indonesia merupakan penguatan dan penguatan peran kebudayaan sebagai dasar sekaligus tujuan pendidikan. Dalam mewujudkan sasaran ini, Indikator Persentase Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pendidikan Berbasis Budaya digunakan untuk mengukurnya.

Pada tahun 2016, telah dapat diimplementasi model pendidikan berbasis budaya di 601 sekolah dari jumlah total 2.980 (20,17%) pada semua jenjang pendidikan. Wujud implementasi sekolah berbasis budaya antara lain: Terintegrasinya aspek kebudayaan pada pembelajaran, Pemenuhan sarpras kebudayaan, Adanya aktivitas kebudayaan di dalam sekolah.



Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Upaya Pemda DIY dalam rangka meningkatkan kemajuan desa budaya dan organisasi budaya dilakukan melalui pengembangan akademi komunitas seni dan budaya Yogyakarta untuk menyiapkan SDM handal dan bersertifikat yang akan disebar di desa-desa budaya untuk mendampingi masyarakat dalam melestarikan seni dan budaya.

Dampak dari penerapan kurikulum sekolah berbasis budaya adalah meningkatnya apresiasi generasi muda terhadap kelestarian budaya lokal, sehingga SDM seni budaya tumbuh berkembang sejak dini. Selain pengetahuan budaya, generasi muda juga terbiasa dan terbudayakan dengan sikap mental dan perilaku yang lebih berkarakter.

Sasaran Harapan Hidup Masyarakat Meningkat

Sasaran ini diukur menggunakan Indikator Angka Harapan Hidup. Angka harapan hidup penduduk adalah salah satu indikator untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk, khususnya meningkatkan derajat kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Keberhasilan program kesehatan dan pembangunan sosial ekonomi pada umumnya dapat dilihat pada penurunan angka kematian ibu, bayi, balita, penurunan angka balita kurang gizi, dan peningkatan pelayanan kesehatan.



Faktor tidak langsung yang turut menyumbang peningkatan angka harapan hidup adalah penurunan angka kemiskinan, Indeks jumlah pengeluaran uang dan PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), tingkat pendidikan dan pelayanan kesejahteraan sosial pada lansia, dan peningkatan berperilaku hidup bersih dan sehat.

Sasaran Pendapatan Masyarakat Meningkat

Sasaran ini diukur menggunakan Indikator Pendapatan Per Kapita Per Tahun. Indikator ini mencerminkan kesejahteraan dan tingkat pembangunan suatu daerah di bidang ekonomi. Peningkatan pendapatan merupakan wujud hasil sinergitas aktivitas berbagai pihak yang terlibat dalam bidang ekonomi baik pemerintah maupun swasta, dan masyarakat. Pengukur "Pendapatan Per Kapita Per Tahun" menggunakan pendekatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY atas dasar harga konstan (ADHK) per kapita yaitu nilai PDRB ADHK dibagi dengan jumlah penduduk.

Indikator Pendapatan Per Kapita Per Tahun



• Tren Pendapatan Per Kapita Per Tahun, 2012-2016

*) Menggunakan Metode Baru (TD2010)

Peningkatan pendapatan per kapita tersebut dicapai karena Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,05% yang lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk sebesar 1,13%. Sementara itu, LPE tersebut didukung oleh pertumbuhan yang terjadi hampir di semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Pengadaan Listrik dan Gas yaitu sebesar 14,26% diikuti oleh Informasi dan Komunikasi sebesar 8,32%, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,09%.

Peningkatan pendapatan tersebut menunjukkan tercapainya kondisi yang dibutuhkan (*necessary condition*) dalam pengurangan tingkat kemiskinan. Persentase jumlah warga miskin menunjukkan kecenderungan penurunan dari tahun ke tahun meskipun persentase warga miskin DIY masih di atas rata-rata nasional. Penduduk miskin DIY turun dari 15,88% tahun 2012 menjadi 13,10%, namun pada akhir periode tersebut capaian DIY masih di bawah nasional yang sebesar 10,70%.

Pemerintah berupaya mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat melalui

- Peningkatan produktivitas masyarakat terutama untuk kelompok miskin dan rawan miskin.
- Program yang bersifat pemberdayaan masyarakat

- Pendampingan usaha
- Pemberian stimulan.
- Program yang bermuatan peningkatan produktivitas angkatan kerja
- Peningkatan akses untuk bekerja

Sedangkan yang menjadi kendala adalah program lintas sektoral dari pemerintah yang belum terintegrasi pelayanannya dan cenderung bersifat parsial. Di samping itu program-program pemberdayaan yang dilaksanakan masih lemah dalam hal pendampingan dan keberlanjutannya..

Sasaran Ketimpangan Antar-Wilayah Menurun

Sasaran ini diukur menggunakan Indikator Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah. Tingkat disparitas antar-wilayah menunjukkan pola yang semakin menurun jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

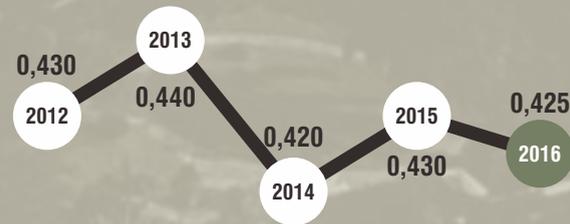
Sasaran Kesenjangan Pendapatan Masyarakat Menurun

Akselerasi pertumbuhan ekonomi berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata melalui peningkatan pendapatan per kapita, namun selain itu, kebijakan tersebut juga berdampak pada peningkatan ketidakmerataan atau ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena kepemilikan aset dan keterampilan/keahlian (*skill*) antar-penduduk tidak tersebar secara merata, sehingga level pendapatan juga sangat bervariasi. Indikator yang menggambarkan derajat ketimpangan pendapatan penduduk (distribusi ukuran) tersebut adalah Koefisien Gini.

GINI index

Realisasi 2016: 0,425

Target 2016: 0,288



- Tren Ketimpangan Pendapatan, 2012-2016

Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan kaya, masih belum dapat diimbangi dengan laju pertumbuhan pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Upaya bersama antar-tingkatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menekan ketimpangan merupakan prioritas agar pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan yang berkualitas.

Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Target dan Realisasi Indeks Ketimpangan Antar-Wilayah



- Tren Ketimpangan Antar-Wilayah, 2012-2016

⚠ Grafik menggambarkan pendapatan antar-wilayah yang semakin merata. Penurunan kesenjangan pendapatan antar-wilayah didukung oleh pemerataan pembangunan di seluruh wilayah DIY.

Upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata & lama tinggal adalah

- Mengembangkan berbagai destinasi wisata baru
- Menyelenggarakan berbagai atraksi.
- Perbaikan sarana prasarana kawasan destinasi wisata
- Menjaga kondisi DIY agar kondusif dukungan
- Akomodasi yang memadai.
- Regulasi Bebas Visa Kunjungan



Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Sasaran Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Visi Pembangunan DIY tahun 2025 yaitu mewujudkan DIY sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera. Keberhasilan DIY dalam mewujudkan visi sebagai daerah tujuan wisata dapat diketahui dari tingkat kunjungan wisatawan. Sasaran ini diukur menggunakan Indikator Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara.

Sasaran Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Meningkat

Sasaran ini diukur menggunakan Indikator Lama Tinggal Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara. Walau lama tinggal wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara masih belum mencapai target, lama tinggal wisatawan nusantara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyaknya pilihan destinasi dan *event* yang diselenggarakan sehingga mampu menambah lama tinggal wisatawan nusantara. Sementara penurunan lama tinggal wisatawan mancanegara dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global, terutama Eropa yang merupakan kontributor jumlah wisman terbesar.

Sasaran Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatkan

Tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya serta kualitas pembangunan dan budaya kinerja birokrasi yang baik menyebabkan hasil evaluasi yang baik. Berbagai upaya perbaikan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui:

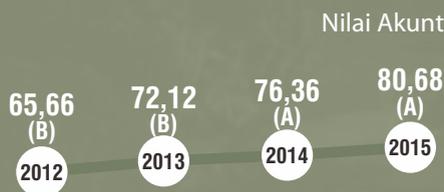
1. Melakukan penjabaran sasaran strategis dan indikator kinerja pada RPJMD melalui penetapan perjanjian kinerja sampai dengan Eselon IV.
2. Menyederhanakan jumlah kegiatan dengan menggunakan Analisis Standar Belanja (ASB) berbasis program.
3. Integrasi manajemen perencanaan pembangunan daerah berbasis IT melalui *warehouse system*.
4. Menurunkan target kinerja tahunan ke target kinerja triwulanan untuk semua SKPD dengan diikuti *monev* capaian kinerja secara triwulan yang tersistem melalui e-Sakip dengan menampilkan informasi mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja.
5. Menerapkan pengukuran kinerja secara berjenjang dari kinerja organisasi diturunkan menjadi kinerja individu sebagai dasar pemberian *reward and punishment*.

Sasaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkatkan

Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal –yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)–. Penilaian tersebut menjadi komponen penting untuk mengetahui secara obyektif akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari segi keuangan. Sasaran ini diukur dengan Indikator Opini Pemeriksaan BPK.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan opini WTP, antara lain:

1. Melakukan perencanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah yang taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab keadilan, kepatuhan dan manfaat.



Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017



- Melaksanakan sistem Akrual basis dalam penatausahaan keuangan disertai peningkatan kapasitas SDM.

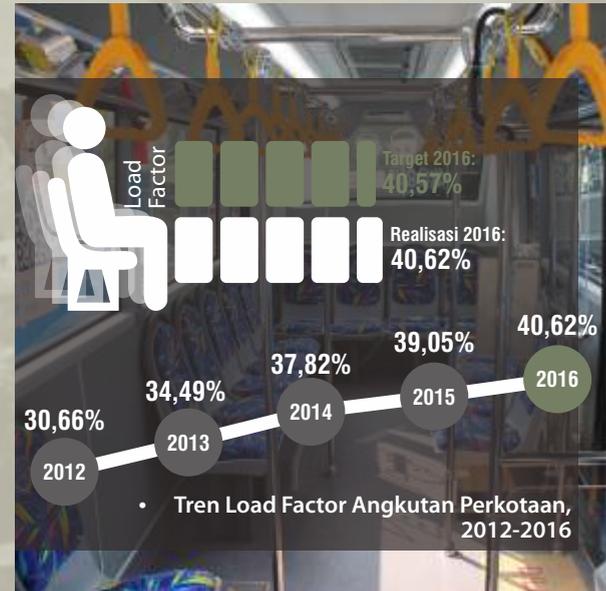
Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam pelaksanaan pengendalian internal. Hasil-hasil tugas pengawasan diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai serta menjadi peringatan dini (*early warning system*) bagi seluruh unsur birokrasi pemerintahan terhadap penyimpangan/kecurangan, kelemahan maupun tindak pelanggaran terhadap sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Sasaran Layanan Publik Meningkat, Terutama Pada Penataan Sistem Transportasi dan Akses Masyarakat di Perdesaan

Dari aspek peningkatan daya dukung jaringan jalan, peran angkutan umum merupakan salah satu variabel di dalam pengendalian volume lalu lintas. Perbaikan angkutan umum dilakukan dengan menggunakan *pull strategy*, yaitu strategi dalam menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Salah satu strategi perbaikan angkutan umum perkotaan Yogyakarta yang telah dilakukan oleh Pemda DIY sejak tahun 2008 adalah dengan mengoperasikan Bus Trans-Jogja sebagai angkutan perkotaan dengan sistem *buy the service*, sebagai salah satu angkutan umum perkotaan bersubsidi yang dinilai cukup baik

Arah kebijakan yang dilakukan yaitu meningkatkan penataan sistem transportasi di DIY yang difokuskan pada pengurangan kemacetan di perkotaan melalui penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta peningkatan pelayanan angkutan umum guna mencapai *load factor* angkutan perkotaan

Faktor yang mendorong terhadap pencapaian target antara lain adanya penambahan jumlah armada dan perubahan pola perjalanan penumpang bus Trans Jogja. Sedangkan, faktor yang menghambat adalah: (1) Masih tingginya



Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

pemakaian kendaraan bermotor pribadi dan belum optimalnya penggunaan angkutan umum yang akan berdampak pada timbulnya kemacetan lalu lintas; (2) Jumlah bus yang beroperasi tidak mengalami penambahan; serta (3) Masih terbatasnya cakupan layanan atau lingkup jalur yang dioperasikan di wilayah Perkotaan Yogyakarta.

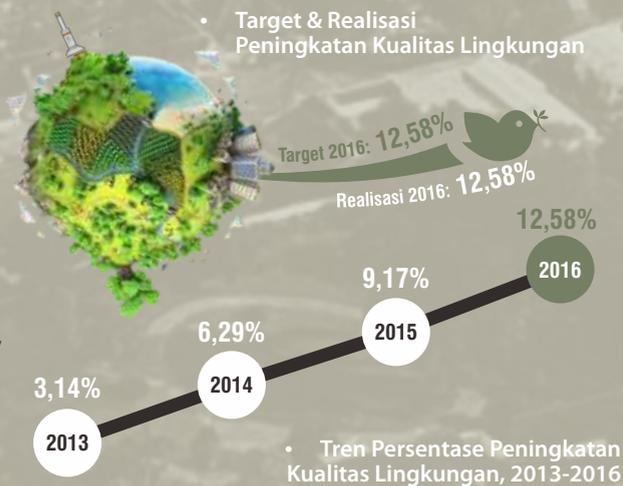
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan *load factor* antara lain: (1) Penambahan jalur bus dari 8 jalur menjadi 17 jalur; (2) Penambahan armada dari 74 armada menjadi 128 armada (pengadaan bus baru seluruhnya sebanyak 83 bus yang peruntukannya 54 bus untuk penambahan layanan dan 29 bus untuk peremajaan; dan (3) Peningkatan layanan terhadap pengguna Trans Jogja antara lain penambahan tiket berlangganan dan halte.

Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat

Sasaran Kualitas Lingkungan Hidup diukur dengan Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup. Indikator kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu: (1) Peningkatan Kualitas air, terdiri dari 3 parameter, yaitu: BOD, COD dan Koli Tinja; (2) Peningkatan Kualitas udara ambien, terdiri dari 2 parameter, yaitu: CO dan HC.

Kadar rata-rata BOD air sungai pada tahun 2016 pada pemantauan 10 sungai adalah 7,86 mg/l, memenuhi target IKU kadar BOD maksimal 8,1 mg/l. Persentase capaian realisasi kadar BOD terhadap target sebesar 100%. Kadar COD rata-rata air sungai adalah 16,32 mg/l telah memenuhi target maksimum 37 mg/l, sehingga capaian terhadap target 100%. Sedangkan rerata kadar Koli 132.666,7 MPN/100 ml di bawah target 175.000 MPN/100 ml

Pencapaian yang baik di sasaran ini merupakan dampak dari partisipasi masyarakat di sepanjang sungai - melalui kegiatan *merti kali* -, pembangunan 44 unit IPAL komunal khususnya di sungai yang melewati perkotaan, pembinaan

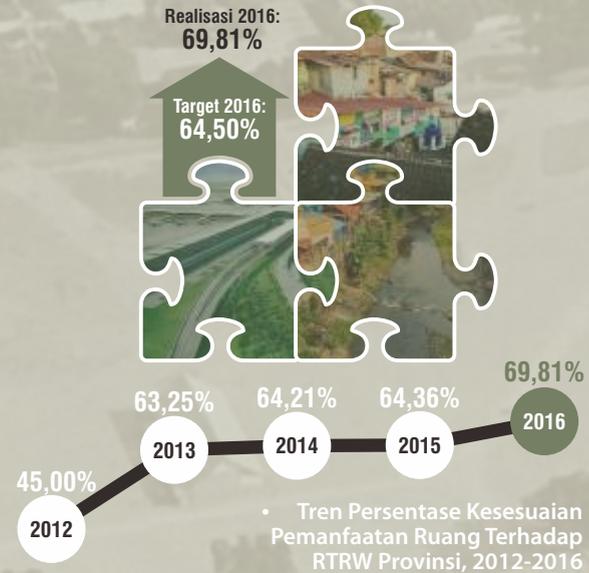


Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY 2017



melalui Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan pelaksanaan Program Kali Bersih (Prokasih).

Realisasi capaian parameter CO dengan nilai rerata $951,37 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang ditetapkan $<8.000 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tercapai 100%. Realisasi capaian parameter HC dengan nilai rerata $19,99 \mu\text{g}/\text{m}^3$ dari target yang diterapkan $<130 \mu\text{g}/\text{m}^3$, tercapai 100%. Angka tersebut didapatkan dari hasil uji pemantauan udara ambien yang dilakukan BLH DIY dengan obyek pemantauan selama 2 periode yaitu Februari-April 2016 dan Agustus-September 2016. Pemantauan udara ambien dilakukan pada roadside sebanyak 30 titik, di sekitar industri sebanyak 20 titik, serta dengan sistem grid di 25 titik.



Sumber: Analisis Balai Statistik Daerah Bappeda DIY, 2017

Sasaran Pemanfaatan Ruang Terkendali

Sasaran ini diukur menggunakan Indikator Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi Meningkat. Indikator ini diukur dari perbandingan luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW dibandingkan dengan luas total wilayah pemanfaatan ruang.

Tantangan pengendalian pemanfaatan ruang akan semakin berat ke depannya seiring dengan meningkatnya aktivitas kegiatan perdagangan dan jasa' industri' pembangunan perumahan' dan aktivitas sosial ekonomi lainnya:



PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pencapaian Target SDGs

Dunia internasional telah menentukan indikator-indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs sendiri memiliki 17 tujuan dan 169 target yang harus dicapai pada tahun 2030. SDGs memiliki target-target yang lebih detail dan multisektor dibandingkan dengan MDGs sebelumnya. Secara global, SDGs memiliki tiga tujuan prioritas yaitu kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan.

Tahun 2016 merupakan masa transisi menuju pencapaian indikator-indikator pembangunan SDGs yang merupakan penyempurnaan dari tujuan MDGs yang belum tercapai. Keberhasilan pembangunan MDGs di DIY menjadi titik strategis menuju SDGs.

Bukti keberhasilan Pemda DIY dalam pencapaian MDGs adalah perolehan DIY atas tiga dari empat jenis penghargaan MDGs, yaitu Provinsi dengan Tingkat Pencapaian MDG Terbaik Tahun 2014 (Terbaik Kedua), Provinsi dengan Pengentasan Kemiskinan Terbaik Tahun 2012-2014 (Terbaik Ketiga), dan Provinsi dengan Pencapaian Indikator MDGs Terbanyak Tahun 2012-2014 (Terbaik Kedua). Keberhasilan ini

diharapkan menjadi pemacu pencapaian kinerja SDGs. Sampai tahun 2016 ini Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu tantangan terbesar dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia adalah mengenai penyediaan data. Untuk memenuhi keterbandingan internasional atau antar-negara dalam mengamati perkembangan atau kemajuan capaian pembangunan berkelanjutan, sejumlah indikator proksi perlu penyempurnaan konsep dan definisinya khususnya dalam hal pengumpulan datanya agar sesuai dengan konsep dan definisi indikator global. Di sisi lain, masih besarnya indikator global yang belum tersedia (85 indikator) perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan dan juga badan dunia, mengingat terbatasnya kapasitas yang ada baik dari segi pendanaan maupun sumber daya manusia.

Realisasi Anggaran

Pemda DIY pada Tahun 2016 memiliki alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.962.056.175.779,- dengan realisasi sebesar Rp1.849.367.416.433,55 (94,26%).

Realisasi Anggaran dan Serapan Anggaran



Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui efisiensi belanja pendukung, antara lain: perjalanan dinas, ada kebijakan pembatasan makan-minum rapat saat Bulan Puasa, sisa dari pelaksanaan kegiatan, honor peserta rapat, belanja alat tulis kantor, belanja bahan bakar kendaraan, belanja listrik.



Pemda DIY berkomitmen tinggi untuk dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, berbagai upaya perbaikan dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai inovasi yang dilakukan. Beberapa inovasi Pemda DIY ntuk meningkatkan pelayanan internal penyelenggaraan pemerintahan dapat diinformasikan sebagai berikut:

E-Performance Based Budgeting

Penerapan *e-performance based budgeting* (anggaran berbasis kinerja) menjadi sebuah kebutuhan untuk menjawab dinamika pelayanan kepada masyarakat yang menunjukkan transparansi, kecepatan, kepekaan terhadap perubahan, optimalisasi informasi teknologi (IT), dan menekankan kebijakan penganggaran berbasis kinerja atau juga dikenal sebagai *program follow result*.

Selain itu penggunaan *e-performance based budgeting*, telah menjadi komitmen nyata dalam menerapkan reformasi birokrasi secara berkelanjutan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang berdampak langsung pada penyelesaian problematika masyarakat.

Kegiatan riil *e-performance based budgeting* di Pemda DIY meliputi integrasi manajemen perencanaan pembangunan daerah yang

berbasis IT, dengan pengelolaan sistem perencanaan (JOGJAPLAN), penganggaran (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah/SIPKD), dan *monitoring* evaluasi (JOGJA KENDALI) setiap tahun sebagai sebuah siklus pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan.

Dalam fase perencanaan yang menggunakan sistem *e-planning* (JOGJAPLAN), semua usulan program dan kegiatan dipastikan harus selaras dengan dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dipastikan alokasi anggaran sesuai dengan pagu indikatif dalam RPJMD, program dan kegiatan dipastikan menunjang sasaran indikator dalam RPJMD, termasuk alokasi kewilayahan maupun sektoral. Ketika telah menjadi APBD, maka tata kelola keuangannya menggunakan SIPKD yang mengatur uraian Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan aliran kas-nya.

Selanjutnya, dengan *warehouse system*, data dari SIPKD dikoneksikan dengan sistem JOGJA KENDALI untuk dinilai kesesuaian pelaksanaannya, yang meliputi: kesesuaian dengan Indikator Kinerja Utama, kesesuaian dengan Renstra SKPD, kesesuaian dengan Perjanjian Kinerja untuk Eselon II (Capaian IKU), Eselon III (Capaian Program), Eselon IV (Capaian Kegiatan) yang dihitung

Sentuhan Inovasi Daerah



berdasarkan capaian kinerja fisik, kinerja keuangan, dan kinerja *outcome* serta secara berkala (setiap tiga bulan sekali) akan diberikan raport kinerja kepada semua SKPD.

Komitmen untuk menerapkan kebijakan *e-government* sudah menjadi garis kebijakan yang dicanangkan oleh Gubernur DIY sejak tahun 2008. Konkretnya, Pemda DIY telah menerbitkan Pergub No. 69 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pergub No. 45 Tahun 2014 tentang Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dan Pergub No. 37.1 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja. Selain itu, Gubernur DIY secara langsung memberikan rapor bagi SKPD yang terbaik dan terburuk sebagai bentuk *reward and punishment* tiap triwulan.

Perubahan *mindset* merupakan kunci penerapan *e-performance based budgeting*. Proses yang terus dan senantiasa dilakukan agar setiap ASN peka terhadap dinamika perubahan yang sedemikian cepat pada era digital. Hal itu dilakukan dengan: (1) memberikan teladan dari tingkat pimpinan tertinggi hingga level terbawah untuk bekerja sekaligus memberikan kemanfaatan; (2) adanya keterbukaan dalam komunikasi baik vertikal maupun horizontal; (3) menerapkan pengelolaan pekerjaan melalui aplikasi IT; (4) mendorong untuk melakukan inovasi; dan (5) menekankan pelaksanaan yang



efektif sekaligus efisien. Perubahan *mindset* itu dilakukan oleh semua lini, secara bertahap, dan berkelanjutan, melalui:

- *Mind setting*, perubahan pola pikir
- *Strategic break trough*, membangun sistem dan mekanisme melalui terobosan, inovasi yang terukur
- *Strategy alignment*, menyelaraskan strategi dan program kerja pada tingkat operasional
- *Managing beliefs and values*, menciptakan jajaran kepemimpinan yang mampu menciptakan empowering dan value (inti budaya kerja)

Penerapan *e-performanced based budgeting* telah memberikan perubahan fundamental bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di DIY baik pada aspek perencanaan, penganggaran, dan money.

1. Penurunan jumlah pegawai dari 15.000 pada 2008 menjadi sekitar 6.759 orang pada 2016.
2. Penurunan jumlah kegiatan dari 3.200 kegiatan pada 2012 menjadi 878 kegiatan pada 2017, dan diorientasikan untuk belanja investasi.
3. Menerapkan pengukuran kinerja secara berjenjang dari kinerja organisasi diturunkan menjadi kinerja individu; sebagai dasar pemberian *reward and punishment*. Dari hasil evaluasi triwulanan diperoleh gambaran bahwa performa kinerja SKPD semakin kualitatif, yang semula terdistribusi dalam tiga kelompok besar (di atas rerata, rerata, dan di bawah rerata) menjadi terdistribusi dalam dua kelompok besar (di atas rerata dan rata-rata) dengan tingkat capaian kinerja >90%.
4. Menerapkan kontrak kinerja (*contract agreement*) sebagai dasar untuk melaksanakan program/kegiatan.
5. Pelibatan tenaga ahli perguruan tinggi dalam memberikan masukan dalam proses perencanaan hingga pengendalian pembangunan daerah.
6. Tidak ada lagi program/kegiatan siluman karena mata anggaran sudah dikunci melalui desain program dengan sasarannya sebagaimana garis RPJMD.

Pemda DIY telah melakukan *review* RPJMD DIY 2012-2017 terakhir pada tahun 2015. *Review*

RPJMD DIY ini dilakukan untuk beradaptasi dengan perubahan kelembagaan di Pemda DIY dan upaya peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai implikasi dari Perdas No. 3 tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemda DIY pada seluruh SKPD DIY. Dalam upaya peningkatan akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah DIY, *review* tersebut dengan perbaikan sasaran dan indikator SKPD, dan indikator kinerja program/kegiatan RKPDIY dengan skema *cascading*. Skema *cascading* RPJMD DIY itu berurutan dari visi-misi-tujuan-sasaran Pemda DIY-sasaran SKPD-Program SKPD. Sasaran Pemda DIY-Sasaran SKPD-Program SKPD masing-masing memiliki indikator sasaran yang akan dituju dan indikator kegiatan serta memiliki gradasi yang cukup jelas sebagai panduan perencanaan pembangunan RKPDIY 2016 maupun 2017. Skema *cascading* itu juga dilengkapi dengan formula perhitungan untuk mendukung akuntabilitas perencanaan pembangunan berupa meta-indikator.

Tahun 2017 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD DIY Tahun 2012-2017, sehingga perlu segera disusun dokumen perencanaan untuk periode berikutnya. Penyusunan RPJMD DIY untuk periode 2018-2022 diawali dengan penyusunan *cascade* RPJMD yang memuat *keywords* dari visi yang

akan diwujudkan selama periode lima tahunan dan cara pencapaian visi tersebut. Rumusan visi dan strategi-strategi untuk mencapai visi menentukan struktur organisasi yang paling efektif dan efisien. Oleh karena *cascade* RPJMD, selain dijadikan landasan penyusunan dokumen RPJMD juga dijadikan dasar untuk melakukan penataan kelembagaan di DIY.

1. Layanan E-Samsat

Pemda DIY sejak tahun 2010 telah mengembangkan pelayanan pajak berbasis sistem pelayanan *online*. Artinya, semua wajib pajak yang berada di wilayah DIY dapat mengakses bentuk pelayanan pajak kendaraan bermotor di 5 KPPD yang ada di Kabupaten/Kota se-DIY. Pemda DIY juga melakukan inovasi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat seperti adanya Loket Khusus bagi Wajib Pajak Lansia dan/atau Wanita serta Difabel. Upaya tersebut merupakan bentuk kepedulian akan kebutuhan masyarakat tertentu yang memerlukan pelayanan khusus. Selain itu, sebagai upaya menjamin transparansi pelayanan publik telah dibangun berbagai fasilitas berbasis teknologi informasi, antara lain: SMS Informasi PKB, dan SMS Informasi Jatuh Tempo. Atas upaya inovasi dan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kinerja pelayanan publik terkait dengan pelayanan pajak di DIY telah diakui di tingkat nasional. KPPD/Samsat se-DIY telah memperoleh penghargaan Piala



Citra Pelayanan Prima (CPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain itu, DIY memperoleh pengakuan pelayanan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori baik untuk 5 KPPD serta Sertifikasi ISO 9001-2008 sejak tahun 2009.

Pada tahun 2016, Gubernur DIY meluncurkan sistem Layanan Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor (roda dua maupun roda empat) secara *online*. Layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara *online* tersebut diberi nama e-Samsat, merupakan kerjasama antara Pemda DIY dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Layanan e-Samsat mengintegrasikan sistem pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor roda dua dan empat dengan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BPD. Inovasi di bidang layanan publik tersebut merupakan inovasi pertama di

Indonesia di bidang perpajakan. Keunggulan e-Samsat DIY dibandingkan layanan yang sama di daerah lain adalah wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dengan mudah melalui ATM sekaligus memperoleh *notice* pajak atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan pengesahan atau validasi STNK secara elektronik tanpa perlu antri di kantor pajak. Dengan adanya layanan e-Samsat, proses perpanjangan STNK kendaraan bermotor secara elektronik dilaksanakan dengan mudah dimana pembayaran tagihan pajak dapat dilakukan di 109 jaringan ATM Bank BPD yang tersebar di wilayah DIY.

E-Samsat merupakan wujud komitmen Pemda DIY dalam mendukung program Nawa Cita dalam hal reformasi sistem dan penegakan hukum yang korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Layanan tersebut sebagai upaya dalam pencegahan pungli, selain pembentukan Satgas Saber Pungli oleh Gubernur. Layanan e-Samsat selain memberi kemudahan masyarakat dalam mengurus pajak, juga merupakan bentuk perbaikan kinerja pemerintah dalam memberi layanan publik yang cepat.

2. Perijinan

Pemda DIY mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai Tahun 2010 dengan membentuk Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dari

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal DIY. Melalui Penataan Kelembagaan yang baru sesuai dengan Perdais DIY No. 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Gerai Pelayanan Perijinan Terpadu mulai Tahun 2016 ditingkatkan status kelembagaannya menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu.

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, dalam menyelenggarakan pelayanan perijinan kepada masyarakat mengembangkan sistem informasi perijinan yang dapat diakses melalui situs <http://ijinonline.jogjapro.go.id/>.

Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi pelayanan perijinan dalam berbagai bentuk, antara lain mempercepat waktu pelayanan dengan mengurangi tahapan-tahapan dalam pelayanan yang kurang penting. Selain pengurangan tahapan, pengurangan biaya juga dapat dilakukan dengan membuat prosedur pelayanan sehingga biaya resmi menjadi lebih transparan. Diharapkan dengan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T) ini, pelayanan menjadi lebih transparan, terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, disediakan secara memadai serta mudah dimengerti dan akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perijinan yang bisa ditangani oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu –mengacu pada Pergub No. 71 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Terpadu Satu Pintu– sejumlah 181 ijin dan non ijin. Terdapat standardisasi pelayanan publik dan Standar Operasional Prosedur yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi aparat pemberi layanan dan masyarakat. Saat ini, proses perijinan bisa dilakukan *online*, sehingga pemohon ijin cukup membawa berkas asli untuk sarana klarifikasi untuk mengambil berkas perijinan.

Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat disediakan layanan pengaduan yang dapat disampaikan melalui telepon, *e-mail*, faksimile, sms, kotak pengaduan, *website*, atau langsung. Sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan semua pengaduan yang masuk akan di respons dan ditindaklanjuti selambat-lambatnya dalam waktu lima hari kerja.

Melalui berbagai upaya perbaikan pelayanan perijinan dan nonperijinan yang terkait dengan penanaman modal, Pemda DIY meraih Penghargaan BKPM *Investment Award* 2014 sebagai peringkat 3 untuk tingkat provinsi. Pada tahun 2016, Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu juga memperoleh penghargaan Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik pada tingkat kepatuhan Tinggi pada Zona Hijau dari Ombudsman RI.



3. Layanan Perpustakaan

Pemda DIY berhasil membangun gedung perpustakaan yang berakar dan kental muatan lokal, sehingga dapat menjadi bangunan yang monumental sebagai *landmark* baru Jogja. Keberadaan perpustakaan menjadi lambang keharmonisan *pranoto nagoro* (Kraton Yogyakarta dengan Sri Sultan HB X sebagai Raja) dengan rakyatnya yang tercermin dari konsep “tahta untuk rakyat” dan menjadikan rakyatnya untuk mencapai tataran manusia sempurna, diperkuat dengan konsep Jawa “Mocopat”.

Adanya bangunan perpustakaan yang monumental tersebut diharapkan dapat mendukung DIY sebagai tujuan wisata pendidikan. Gedung perpustakaan dengan nama Grhatama Pustaka tidak semata-mata menawarkan keunggulan fisik bangunan tetapi juga keunggulan layanan. Perpustakaan DIY merupakan satu-satunya perpustakaan di Indonesia yang telah terakreditasi ISO 9001:2015. Beberapa layanan unggulan perpustakaan DIY antara lain:

- a) Koleksi perpustakaan yang lengkap baik buku maupun koleksi digital berupa naskah kuno, koran, pustaka, dan buku langka.
- b) Tersedia koleksi budaya khusus Jogja (Jogjasiana);
- c) Sistem otomasi peminjaman dan pengembalian buku menggunakan teknologi *Radio Frequency Identification* (RFID). Dengan sistem ini, proses peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan secara mandiri.
- d) Sistem pendukung layanan berupa aplikasi *web GIS* untuk mengetahui sebaran perpustakaan yang ada di DIY.
- e) Penyediaan pojok budaya Indonesia dan dunia;
- f) Disediakan wahana permainan anak;
- g) Disediakan paludarium dengan beberapa satwa untuk pembelajaran;
- h) Tersedia pertunjukan teater petualangan 6 Dimensi,

Selain layanan yang dapat diperoleh di Grhatama Pustaka, dikembangkan juga layanan perpustakaan digital dengan menggunakan *platform* android: iJOGJA. Selain koleksi buku yang sampai saat ini sudah ada 2.232 koleksi, aplikasi iJOGJA juga menyediakan buku ajar elektronik untuk anak sekolah.

Pemda DIY juga mengembangkan layanan layanan perpustakaan keliling dan layanan Pojok Baca untuk memudahkan masyarakat

mendapatkan dan mengakses buku bacaan. Pojok Baca dikembangkan dan dilaksanakan di 10 lokasi pelayanan publik seperti Rumah Sakit, Kantor Pos, BPJS, dan Samsat.

Pemda DIY melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah berhasil membangun jejaring dengan perpustakaan dari berbagai perguruan tinggi, sekolah dan perpustakaan kabupaten/kota yang ada di DIY. Jejaring yang berhasil dibangun tersebut terwadai melalui penyediaan informasi mengenai koleksi yang ada pada 40 perpustakaan yang dapat diakses melalui alamat <http://www.jogjalib.com>. Melalui situs ini, dapat diperoleh informasi keberadaan lebih dari 1.000.000 judul buku, berita dan informasi aktivitas perpustakaan mitra, serta tautan pendukung kegiatan akademik di wilayah DIY.

4. Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu

Sebagai implementasi Perda DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Hak Penyandang Disabilitas yang salah satunya mengamanahkan adanya Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dan kemudian ditindaklanjuti dengan Pergub No. 51 Tahun 2013 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus), dimana program tersebut ditujukan untuk memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dan alat bantu bagi penyandang disabilitas.





Aksesibilitas menjadi sorotan utama terkait dengan panjangnya prosedur layanan reguler yang menyulitkan penyandang disabilitas. Keterbatasan fisik, mental dan sosial ekonomi yang dimiliki penyandang disabilitas membuat banyak hambatan dalam melakukan mobilisasi, disamping dapat meningkatkan resiko kesehatan.

Sebagai wujud keberpihakan pada penyandang disabilitas, Pemda DIY menggagas Program Jamkesus Terpadu dimana dalam jangka pendek dilaksanakan dengan layanan *one stop service* dan dalam jangka menengah melalui pengembangan layanan reguler terpadu. Layanan *one stop service* mengintegrasikan: (1) mobilisasi antar jemput pasien oleh berbagai penggiat sosial; (2) Pendataan sosial dan administrasi kependudukan oleh sektoral dan LSM; (3) Penjaminan oleh Bapel Jamkesos; (4) Layanan kesehatan primer, spesialisik dan rujukan oleh berbagai RS-Puskesmas; (5) Pemberian alat bantu oleh penyedia alat; dan (6) *Assesment* pendidikan vokasional oleh sektoral. Seluruh layanan dihadirkan bersama dalam satu hari serta mobil ke berbagai wilayah. Program jangka menengah dilakukan dengan penguatan sistem layanan, penguatan jejaring *provider*, perbaikan sistem data, perbaikan regulasi, perbaikan pedoman teknis pelayanan, dan peningkatan kapasitas SDM.

Program Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu telah meningkatkan akses layanan oleh disabilitas dari <100 pasien menjadi 3.412 pasien, pemberian alat bantu dari 6 menjadi 876, pembiayaan dari <200 juta menjadi hampir 2,5 milyar rupiah pada tahun 2016. Program ini juga mampu menyerap dukungan anggaran di luar Pemerintah hampir mencapai 1 milyar rupiah, dan mampu menyatukan hingga 48 *stakeholders*.

Program Jaminan Kesehatan Khusus Penyandang Disabilitas Terpadu di DIY telah menarik perhatian mulai dari Kementerian terkait, WHO, Google, GIZ, Handycap, UCP Wheels, Rotary, dan lainnya. Perwakilan WHO Jenewa dan Kementerian menyampaikan bahwa gagasan ini merupakan inovasi baru dan diharapkan menjadi model. WHO dan UCP Wheels secara khusus telah memberikan bantuan dana pengembangan, sementara berbagai NGO telah melakukan advokasi untuk replikasi di level nasional/lokal.

2. Penyusunan Standar Belanja (SB) Berbasis Program

Perencanaan program maupun kegiatan mengalami pergeseran tidak lagi sekedar berdasarkan fungsi organisasi dan program (*money follow program*), melainkan sudah menekankan kepada kinerja atau pencapaian

sasaran yang ditetapkan (*money follow function*). Untuk itu, suatu program ditetapkan untuk mendorong penyelesaian sasaran yang menjadi permasalahan mendasar dalam suatu wilayah. Program tidak lagi sekedar menjalankan fungsi organisasi tetapi harus memiliki dampak yang signifikan dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan menyelesaikan persoalan pembangunan daerah dengan skala prioritas (*program follow result*) serta menekan adanya eksploitasi anggaran untuk mengoptimalkan efisiensi.

Optimalisasi belanja langsung menjadi salah satu arah kebijakan dalam pengelolaan belanja di Pemda DIY. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemda DIY telah secara konsisten melakukan rasionalisasi terhadap belanja aparatur, baik yang berasal dari komponen gaji dan tunjangan maupun belanja aparatur pada belanja langsung. Hal tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran. Upaya-upaya yang dilakukan dalam kerangka rasionalisasi belanja adalah dengan menetapkan standar belanja yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur tentang Standar Belanja dan Standar Harga Barang Jasa (SHBJ) yang diterbitkan setiap tahun.

Standar Belanja dimaksudkan sebagai pedoman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan belanja maksimal program berdasarkan proses dan sub proses, kebutuhan belanja dan batasan belanja maksimal setiap kegiatan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran. Penerapan Standar Belanja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas anggaran belanja dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian.

Standar Belanja dengan pendekatan kebutuhan belanja program diterapkan di Pemda DIY pada tahun 2017 dan merupakan satu-satunya Pemerintah Daerah di Indonesia yang menyusun SB berbasis program. Sebelumnya, Standar Belanja disusun dengan menganalisis kebutuhan belanja di level kegiatan. Perubahan pendekatan dalam penyusunan SB dari kegiatan menjadi program merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan Gubernur DIY untuk menyusun program/kegiatan yang berdampak besar kepada masyarakat. Sebagai langkah konkret kemudian dilakukan rasionalisasi terhadap jumlah program kegiatan di Pemda DIY yang dimulai pada tahun 2015. Rasionalisasi program kegiatan ditempuh dengan mengutamakan program kegiatan prioritas untuk dibiayai termasuk dengan menyusun Standar Belanja basis program. Kebijakan rasionalisasi telah menghasilkan struktur program pembangunan yang lebih

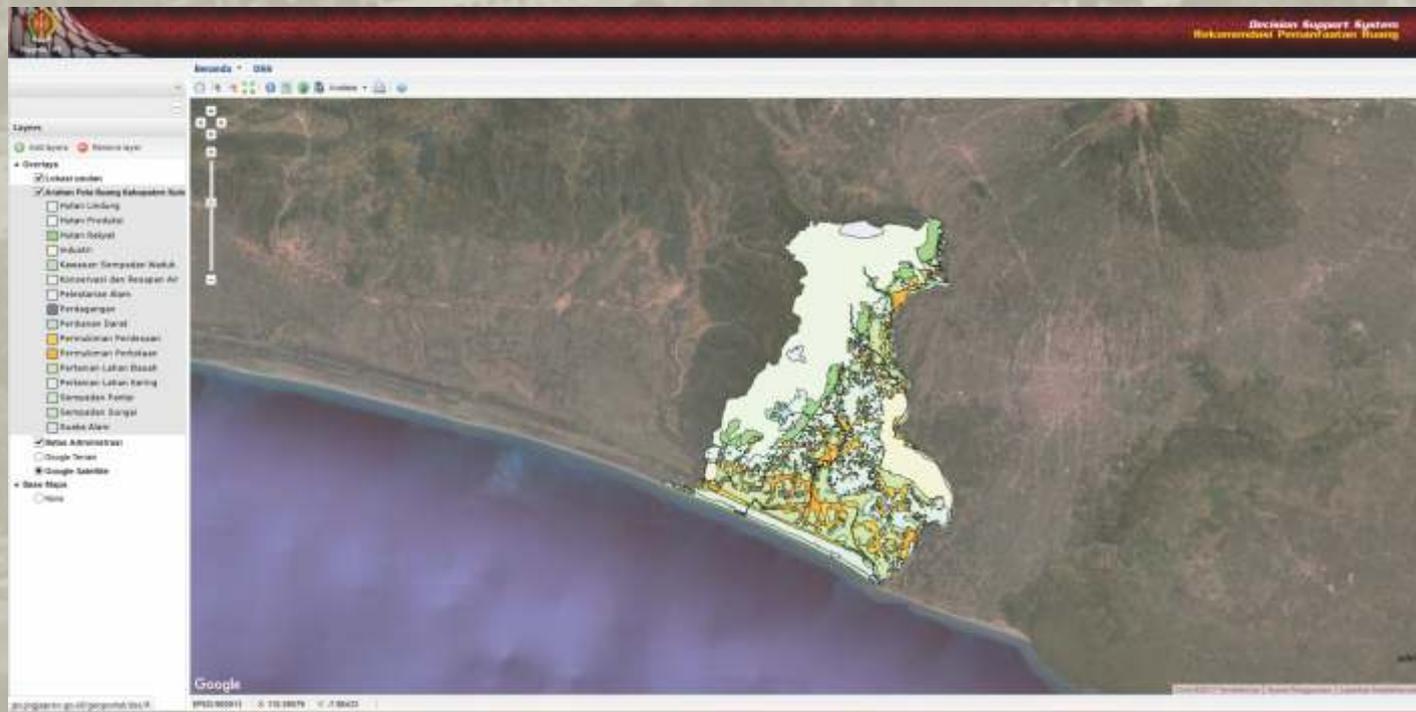
ramping, dibuktikan dengan jumlah program kegiatan yang berkurang secara signifikan dari tahun ke tahun.

3. **Decision Support System (DSS)** **Rekomendasi Pemanfaatan Ruang**

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya perencanaan keruangan selain sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Perencanaan ruang atau wilayah didasarkan pada daya dukung dan optimasi pemanfaatan ruang, sedangkan perencanaan pembangunan nasional lebih menitikberatkan pada perencanaan sektoral. Pada praktiknya, kedua sistem perencanaan tersebut belum benar-benar padu dalam hal substansi rencana yang kemudian berdampak pada ketidaksesuaian, penyimpangan, atau pengabaian tata ruang

dalam rencana pembangunan maupun pembangunan fisik yang dilakukan berbagai *stakeholders*.

Dalam rangka integrasi pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan rencana tata ruang, Pemda DIY menerbitkan Pergub No. 68 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang. Penerapan analisis tata ruang pada perencanaan pembangunan diharapkan dapat memadukan antara perencanaan pembangunan yang memperhatikan arah kebijakan spasial dalam bentuk rencana tata ruang dan rencana tata ruang yang dapat mengidentifikasi prioritas program/kegiatan sektoral di dalam RPJMD/RKPD sehingga dapat mengarahkan atau mendorong program/kegiatan tersebut untuk perwujudan pola maupun struktur ruang yang sudah direncanakan di dalam dokumen rencana tata ruang. Namun demikian, analisis spasial dalam memberikan rekomendasi



pemanfaatan ruang menjadi kendala tersendiri dikarenakan dalam menganalisis dibutuhkan waktu, SDM, dan sarana prasarana secara khusus.

Pemda DIY melalui Bappeda DIY pada tahun 2014 telah mengembangkan *Decision Support System* (DSS) Rekomendasi Pemanfaatan Ruang berbasis web dengan alamat <http://gis.jogjaprovo.go.id/geoportal/dss/>

Pengembangan DSS Rekomendasi Pemanfaatan Ruang bertujuan: (1) mempermudah SKPD dalam melaksanakan Pergub No. 68 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Pemanfaatan Ruang; (2) Integrasi Rencana pembangunan dan rencana tata ruang; (3) Kemudahan dalam pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang; (4) Kemudahan akses bagi publik dalam memperoleh informasi kesesuaian tata ruang.

Dengan DSS Rekomendasi Pemanfaatan Ruang, proses rekomendasi pemanfaatan ruang akan lebih cepat dan mudah. Aplikasi ini mempermudah Bappeda DIY dalam hal pengurusan rekomendasi pemanfaatan ruang. Selain itu, dapat pula diakses oleh publik dengan fasilitas tampilan informasi tata ruang dari lokasi ruang yang dipilih. *Input* dari sistem ini adalah lokasi ruang yang berupa titik, garis atau poligon beserta kode usulan rekomendasi yang digunakan untuk pembuatan riwayat proses administrasi. Sistem ini juga terintegrasi

dengan *google earth*, sehingga informasi dari citra dapat diperoleh langsung. Proses yang dilakukan pada sistem ini adalah berupa perekaman proses pengeluaran rekomendasi (riwayat proses administrasi); dan *overlay* serta *query spatial* dari lokasi ruang yang dimasukkan terhadap peta tata ruang yang selanjutnya dilakukan proses *summarizing*. *Output* dari sistem ini adalah informasi tata ruang yang ada pada lokasi ruang yang dimasukkan berserta hasil *summarizing* yang berupa luas peta tata ruang yang ber-*overlay* dengan lokasi ruang. Sebagai bahan rekomendasi, sistem ini juga menghasilkan draf surat rekomendasi yang berisi variabel yang digunakan untuk pengambilan keputusan rekomendasi pemanfaatan ruang.

DSS dapat dioperasikan dengan mudah (*user friendly*). DSS juga dapat diakses bebas oleh publik, sehingga sekaligus sebagai media penyebarluasan informasi produk penataan ruang di DIY dari skala provinsi sampai skala detil (RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota, dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) wilayah tertentu). Dengan demikian, ketidaksesuaian pemanfaatan ruang akibat pembangunan dapat diminimalkan sehingga segala dampak akibat ketidaksesuaian pemanfaatan ruang, seperti penurunan kualitas ruang, kerusakan sumber daya alam, dan lainnya tidak perlu terjadi.



Perjalanan panjang reformasi birokrasi DIY telah mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak yang di antaranya adalah:

1. Tingkat capaian MDG's terbaik nasional;
2. Skor *National Corruption Index* terendah nasional;
3. Telah 6 kali secara berturut-turut memperoleh predikat WTP tanpa paragraf;
4. Skor Indeks Tata Kelola Pemerintahan tertinggi di Indonesia;
5. Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah tertinggi diantara provinsi lain dengan nilai A;
6. Selama 2 tahun berturut-turut memperoleh predikat Perencanaan Terbaik Nasional (Pangripta Nusantara).
7. Penghargaan Anugerah Dana Rakca Terbaik 2016 atas kinerja dalam pemanfaatan Dana Insentif Daerah



Keberhasilan pembangunan di DIY diukur dengan indikator-indikator beserta target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Secara umum, kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2016 menunjukkan kinerja yang baik. Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditunjukkan oleh angka-angka hasil pengukuran kinerja yang telah mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi juga menunjukkan trend peningkatan kinerja dari tahun ke tahun. Kinerja yang berhasil diwujudkan pada tahun

2016 tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen dari semua pihak.

Meskipun kinerja pembangunan sudah relatif baik, namun masih terdapat beberapa catatan atas kinerja tahun 2016. Dari hasil pengukuran kinerja terhadap 15 sasaran pembangunan DIY, terdapat tiga sasaran yang belum memenuhi target sehingga memerlukan upaya-upaya perbaikan yang lebih serius. Ketiga sasaran tersebut adalah lama tinggal wisatawan, ketimpangan pendapatan dan ketimpangan

Penutup

jogja

istimewa

antar-wilayah. Meningkatkan lama tinggal wisatawan dalam rangka mewujudkan pariwisata berdaya saing tinggi masih menjadi tantangan bagi Pemda DIY. Demikian juga dengan persoalan ketimpangan baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar-wilayah di DIY yang tecermin dari angka Indeks Gini dan Indeks Wiliamson yang relatif masih tinggi.

Penyelenggaraan pemerintahan tahun 2016 merupakan tahun IV dari RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen yang terlibat dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, sehingga target akhir 2017 yang merupakan tahun terakhir RPJMD DIY Tahun 2012-2017 dapat terwujud.

Untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan, diperlukan upaya-upaya perbaikan secara terus menerus dan berkelanjutan. Beberapa langkah strategis akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja, antara lain:

- (1) Melakukan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan yang didasarkan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan. Dalam hal ini komitmen seluruh SKPD perlu ditingkatkan dengan memperhatikan setiap aspek dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kualitas hasil evaluasi perlu diupayakan dengan analisis terhadap faktor pendorong dan penghambat dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi berbagai pihak, baik di lingkup internal Pemda DIY maupun Pemda DIY dengan unsur-unsur pembangunan yang lain. Tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dengan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak, upaya-upaya mencapai target sasaran pembangunan akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.
- (3) Meningkatkan kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat melalui inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik.







**Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Bappeda DIY**

Kepatihan Danurejan Telp. 0274 - 562811
(Psw. 1209 - 1220, 1243 - 1246, 1253), 511185 Fax. 0274 - 586712
<http://bappeda.jogjaprovo.go.id>
Yogyakarta
55213

